

## ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO

Oleh:

Anastasia Friska Palilingan<sup>1</sup>

Harijanto Sabijono<sup>2</sup>

Lidia Mawikere<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email : <sup>1</sup>[tasya@ymail.com](mailto:tasya@ymail.com)

<sup>2</sup>[harijanto@yahoo.com](mailto:harijanto@yahoo.com)

<sup>3</sup>[lidiawikere@yahoo.com](mailto:lidiawikere@yahoo.com)

### ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-Undang Pemerintah No.105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP. No.58 Tahun 2011), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Penelitian ini akan membahas analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) Dinas Pendapatan Kota Manado. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode evaluasi (*evaluation method*) yaitu untuk melihat sejauh mana penerapan atau implementasi pengembangan dari Dinas Pendapatan Kota Manado. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Manado dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Manado tahun 2009-2013 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dan PAD positif. Pertumbuhan PAD kota Manado dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan. Kinerja pemerintah Kota Manado dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Manado sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2011.

**Kata kunci:** kinerja belanja, realisasi anggaran

### ABSTRACT

*Financial management area has undergone fundamental changes since the implementation of regional autonomy in 2001. The law governing 105 in 2000 (now replaced by Regulation No. 58 of 2011), of the Regional Financial Management and Accountability, the general provision states that the definition of regional finance is all the rights and obligations in respect of the area of local government that can be valued in money including all forms of wealth of the area, this research will discuss the performance analysis of expenditure in the budget realization report (LRA) Revenue Service Manado. This type of research is to use the method of evaluation (evaluation method) is to look at the extent to which the application or implementation of the development of the city of Manado Revenue Service. Manado city government revenue performance seen from the analysis of revenue growth Manado pretty good year 2009-2013. It is shown from the average revenue, growth and positive earnings. Revenue growth in the city of Manado from year 2009 to 2013 tended to decrease while the growth of revenue tends to fluctuate. Performance Manado city government of financing analysis is generally good looks of Silpa the positive balance which means the government has the right Manado City in preparing a budget plan, except for the year 2011.*

**Keywords:** the performance of expenditure, the budget realization.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya PAD. Semakin besar dana PAD berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Jenis pajak kabupaten/kota menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat (2) terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan.

Tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dampak dari krisis tersebut terlihat pada sektor swasta seperti pasar modal dan pada sektor publik (pemerintah). Berbagai dampak negatif seperti bertambahnya pengangguran dan peningkatan kemiskinan bermunculan. Pengaruh negatif krisis moneter juga terjadi pada APBN yang pada gilirannya berdampak pula pada APBD. Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memperhatikan pada daerah yang PAD rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi.

Pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah yang mengalami tekanan keuangan mengakibatkan penyusunan APBD menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah. Tekanan keuangan (*fiscal stress*) berakibat pada tidak stabilnya kesiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota terutama pada segi keuangannya, kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD. Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba usaha daerah, dan PAD lainnya yang sah. Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping itu memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota setelah diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana DAU, DAK, serta penerimaan lainnya, dan penerimaan pinjaman daerah.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Kinerja Belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Kota Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi

*Amerika Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan atau dapat dikatakan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya.

Reeve *et al* (2009:3) mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna tentang aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah bisnis. Hongren dan Harrison (2009:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Kamaruddin (2013:6) Akuntansi adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan menyediakan informasi kepada pemegang saham, kreditur dan pihak berwenang biasanya bersifat kuantitatif dan sering kali disajikan dalam satuan moneter, untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan pada investor, kreditur, instansi yang berwenang serta masyarakat. Akuntansi telah mengalami perubahan yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Meskipun tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk secara langsung kapan akuntansi mulai dipraktikan, dapat diperkirakan bahwa akuntansi telah digunakan sejak zaman sebelum masehi. Dengan demikian semakin majunya peradaban manusia, tentu saja pencatatan, pengikhisaran, dan pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. (Lubis 2010:2). Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: Akuntansi merupakan proses mengenali, mencatat, menggolongkan, meringkas, mengukur, mengkomunikasikan dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien bagi suatu perusahaan.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Halim, 2007:75). Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi di atas, kiranya dapat diikhtisarkan beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan pengertian akuntansi pemerintahan, sebagai berikut:

1. Akuntansi adalah aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan;
2. Objek akuntansi pemerintahan adalah transaksi-transaksi keuangan pemerintahan sebagai implikasi dari pelaksanaan APBN/APBD;
3. Output akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan pemerintah yang merupakan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN/APBD.

Darise (2008:26) mengatakan bahwa apabila dikaji dari entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik, karenanya akuntansi keuangan daerah termasuk kedalam akuntansi sektor publik.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

PP. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang duwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Dalam konteks daerah, laporan ini ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Di sini, sumber informasi adalah pemerintah daerah bersangkutan. Laporan keuangan harus tersaji secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun pemerintah daerah lain. Laporan keuangan harus mengungkapkannya secara transparan sehingga mampu menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Akuntansi Belanja Daerah**

Halim (2008:73) mengemukakan belanja adalah pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Lebih lanjut Deddy dkk. (2009:187) menjelaskan belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Sedangkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belanja adalah pengeluaran pemerintah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Halim (2008:73) mengungkapkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu :

- a. Belanja Administrasi Umum
- b. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Transfer
- e. Belanja Tak Tersangka.

Halim (2008:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

### Penelitian Terdahulu

1. Faqihudin (2014) melakukan penelitian Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. Kecenderungan yang terjadi pada perencanaan anggaran di Kabupaten /Kota terkait dengan partisipasi masyarakat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari jumlah dana alokasi yang menyangkut kepentingan masyarakat pada APBD masih dirasakan kurang oleh masyarakat sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari kelima analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja APBD Kota Tegal yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, analisis pembiayaan kecuali analisis keserasian belanja menunjukkan hasil yang cukup baik sehingga dari sisi analisis ini kinerja APBD Kota Tegal menunjukkan hasil yang positif.
2. Daling (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini dilakukan di Dinas PPKAD yang beralamat di Lingkungan 1 Kelurahan Pasan. Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Meningkatkan PAD merupakan hal yang harus dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini akan membahas Analisis kinerja belanja dalam LRA Dinas Pendapatan Kota Manado. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode evaluasi (*evaluation method*) yaitu untuk melihat sejauh mana penerapan atau implementasi pengembangan dari Dinas Pendapatan Kota Manado.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Membawa surat izin penelitian, pengambilan data di kantor Dinas Pendapatan Kota Manado. Periode waktu dimulai dari bulan September 2014 sampai dengan skripsi diseminarkan.

## Prosedur Penelitian

Dalam upaya menganalisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada dinas pendapatan kota Manado maka prosedur penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi dinas pendapatan kota Manado
2. Mengetahui proses serta akuntansi kinerja belanja.
3. Menganalisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado

## Metode Pengumpulan Data

### Jenis Data

Kuncoro (2009:145) mengelompokkan data kedalam dua jenis data kualitatif dan kuantitatif. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam angka-angka.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numeric (angka).

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan / instansi terkait melalui hasil wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil diluar perusahaan/instansi terkait, dalam bentuk literature-literatur akuntansi pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*), untuk melengkapi data, penulis melakukan penelitian kepustakaan yakni melalui buku-buku menyangkut masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*Field research*) Yaitu penelitian dilakukan melalui: Wawancara, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat dan staf yang ada di Dinas Pendapatan Kota Manado.
3. Observasi, Data yang diperoleh dalam melaksanakan sampel kosioner kepada pegawai Dinas Pendapatan Kota Manado (Bendahara).

## Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode dimana data yang dikumpulkan disusun, dikelompokkan, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk mengetahui kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado.

## Definisi Operasional

Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media subyektif yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan. Indikator kinerja keuangan :

1. Resiko
2. Ukuran Perusahaan

Laporan Realisasi Anggaran adalah mengenai informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Indikator laporan realisasi keuangan:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan

7. Pembiayaan netto

8. Selisih (lebih/kurang) pembiayaan anggaran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

#### 1. Analisis Pertumbuhan Belanja

**Tabel 1. Pertumbuhan Belanja Tahun 2009-2013**

| Tahun | Banja Daerah         | Tingkat Pertumbuhan |
|-------|----------------------|---------------------|
| 2009  | 1.215.604.923.000,00 | 0,716               |
| 2010  | 1.066.043.636.000,00 | (0,123)             |
| 2011  | 1,219.659.901.765,00 | 0,144               |
| 2012  | 1.415.485.418.218,00 | 0,160               |
| 2013  | 1.751.826.795.575,00 | 0,275               |
|       | Rata-rata            | 0,234               |

Dari tabel perhitungan nomor 1 dapat terlihat bahwa pertumbuhan belanja Kota Manado menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun untuk tahun pertumbuhannya negatif yaitu sebesar -12,3%. Kecenderungan pertumbuhan belanja Kota Manado fluktuatif terlihat dari tahun 2009 sampai 2013 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 71,6 %, -12,3 %, 14,4 %, 16 %, 27,5 %..

#### Analisis Keserasian Belanja

#### 2. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap total belanja

**Tabel 2. Tabel Pertumbuhan Belanja Tahun 2009-2013**

| Rasio  | % Rasio   |
|--|---|
| Rasio Belanja Rutin terhadap Total Belanja (Total Belanja Rutin / Total Belanja Daerah) x 100%             |   |
|  | $\frac{813.822.513.000,00}{1.215.604.923.000,00}$ |
|  | 0,669   |
| Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja (Total Belanja Pembangunan / Total Belanja Daerah) x 100% |   |
|  | $\frac{401.782.410.000,00}{1.215.604.923.000,00}$ |
|  | 0,330   |

Dari perhitungan rasio table nomor 2 terlihat bahwa untuk tahun 2009 sebagian besar danayang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap total belanja masih relatif kecil yaitu sebesar 33 % di bandingkan dengan rasio belanja rutin yang sebesar 66,9 %.

## 3. Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 3. Tabel Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2009-2013

| Tahun     | Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (Total Belanja Operasi / Total Belanja) x 100% | Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (Total Belanja Modal / Total Belanja) x 100% | % Rasio |       |
|-----------|---|---|---------|-------|
| 2010      | 161.031.425.197,00  | 174.142.472.202,00  | 0,160   | 0,173 |
|           | 1.006.043.636.000,00  | 1.006.043.636.000,00  |         |       |
| 2011      | 173.553.283.915,00  | 212.568.132.482,00  | 0,142   | 0,174 |
|           | 1.219.659.901.765,00  | 1.219.659.901.765,00  |         |       |
| 2012      | 203.182.471.317,00  | 247.999.761.705,00  | 0,143   | 0,175 |
|           | 1.415.485.418.218,00  | 1.415.485.418.218,00  |         |       |
| Rata-rata |   |   | 0,148   | 0,174 |

Hasil perhitungan pada Tabel 3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2010-2012 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasi sehingga rasio belanja operasi relatif kecil dari rasio belanja modal. Untuk belanja modal yaitu sebesar 17,4 % sedangkan untuk belanja operasi yaitu sebesar 14,8 %. Ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya melebihi 1 tahun yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang disesuaikan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

## 4. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tabel 4. Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2009-2013

| Rasio  | % Rasio              |
|--|----------------------|
| Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (Total Belanja Langsung / Total Belanja Daerah) x 100%             |                      |
|  | 1.025.348.248.289,00 |
|  | 1.751.826.795.575,00 |
|  | 0,585                |
| Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (Total Belanja Tidak Langsung / Total Belanja Daerah) x 100% |                      |
|  | 726.478.547.286,00   |
|  | 1.751.826.795.575,0  |
|  | 0,414                |

Tabel 4, perhitungan diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2013 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja langsung sehingga rasio belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 58,5 % sedangkan rasio belanja tidak langsung yaitu sebesar 41,4 %. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

## Analisis Efisiensi Belanja Daerah

**Tabel 5. Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2009-2013**

| Tahun | Anggaran Belanja     | Realisasi Belanja    | Rasio Efisiensi |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2009  | 1.215.604.923.000,00 | 1.125.322.388.684,72 | 0,920           |
| 2010  | 1.066.043.636.000,00 | 1.004.754.999.719,81 | 0,942           |
| 2011  | 1.219.659.901.765,00 | 1.146.819.824.075,06 | 0,940           |
| 2012  | 1.415.485.418.218,00 | 1.322.425.419.515,94 | 0,934           |
| 2013  | 1.751.826.795.575,00 | 1.392.698.096.687,55 | 0,744           |

Dari perhitungan tabel 5 terlihat bahwa pemerintah Kota Manado telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2009 – 2013 berada dibawah 100 %, dengan rata-rata 74,4 %. Ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Manado baik.

## Pembahasan

Salah satu pos yang paling urgen untuk dianalisis dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja pemerintah Kota Manado secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Manado sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2011 yang mana SILPanya dalam realisasi lebih tinggi dari anggarannya yaitu sebesar Rp 617.552.686,40. Dari analisis secara umum kinerja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009 – 2013 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2013 yaitu sebesar 92,57 %, 94,25 %, 94,03 %, 93,43 %, 79,50 %. Realisasi belanja daerah yang paling rendah terjadi tahun 2013. Apabila seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Manado.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Kinerja belanja pemerintah Kota Manado dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009-2013 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya dari tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 90,75%.
2. Pertumbuhan belanja Kota Manado menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 23,4% dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif.
3. Sebagian besar pendapatan daerah Kota Manado untuk tahun 2009 dialokasikan ke belanja rutin yaitu sebesar 66,9%; Untuk tahun 2010-2012 dialokasikan lebih besar ke belanja modal dibandingkan belanja operasi yaitu sebesar 17,4%; Untuk tahun 2013 dialokasikan lebih besar untuk belanja langsung yaitu sebesar 58,5%.
4. Kinerja pemerintah Kota Manado dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Manado sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2011.

### Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk kinerja belanja pada dinas pendapatan Kota Manado, setiap unsur yang terlibat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing-masing unsur dapat berjalan baik, efektif dan efisien.
2. Kinerja belanja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009-2013 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dan hendaknya hal ini harus dipertahankan dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT. Indeks, Jakarta.
- Daling, Marcelino. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108891&val=1025>. Diakses 12 November 2014. Hal 82-89.
- Faqihudin, M. 2014. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik*. Jurnal Ekonomi. Universitas Pancasakti Tegal. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=142255&val=5334>. Diakses 12 November 2014. Hal.1-22.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. UUP STIM.
- Kamarudin, Ahmad. 2013. *Akuntansi Manajemen*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi 3. Erlangga, Jakarta.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Kepriilakuan* Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Reeve, James, Carl S. Waren, Jonathan Duchac. 2009. *Principles of Accounting*, 23<sup>rd</sup> Edition. South-Western Cengage Learning, China.